

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Ditinjau dari aspek kemandirian daerah, pelaksanaan otonomi diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

Menyadari pentingnya otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang–Undang tersebut membawa perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten/kota pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparansi, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Selain itu juga bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan dalam konteks tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, serta keadilan dan pemerataan. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi, harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pemerintah daerah dituntut mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahnya sendiri, sehingga tidak terlalu bergantung dari dana perimbangan yang dikirim oleh pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) maka akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan daerah kepada pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuannya menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di sisi lain dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 17 mendefinisikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengandung unsur pendapatan dan belanja, pendapatan yang dimaksud adalah sumber-sumber penerimaan untuk membiayai daerah tersebut, sedangkan belanja adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah data perkembangan PAD dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTT selama 3 (Tiga) tahun terakhir yaitu periode tahun 2011-2013 dapat dilihat dari Tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Data PAD dan Belanja Daerah Kab/Kota Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam ribuan rupiah)

No.	Kab/Kota	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		PAD	Belanja Daerah	PAD	Belanja Daerah	PAD	Belanja Daerah
1	Kota Kupang	47.702.928	592.686.661	66.169.375	674.177.752	72.091.828	840.630.220
2	Kabupaten Kupang	33.575.390	671.378.291	35.940.252	769.983.638	51.060.548	857.719.778
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	25.923.443	636.330.391	32.354.197	749.801.864	36.327.694	825.657.887
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	13.727.580	474.231.351	17.685.916	545.827.498	20.025.755	643.001.956
5	Kabupaten Belu	34.801.621	675.880.287	47.085.113	724.185.827	48.431.538	767.739.588
6	Kabupaten Alor	20.221.404	488.699.329	22.348.417	573.006.390	33.000.000	667.625.366
7	Kabupaten Lembata	17.558.704	385.945.006	21.303.587	428.716.880	26.765.215	526.670.706
8	Kabupaten Flores Timur	21.374.790	495.239.368	30.228.684	600.097.536	29.643.475	697.879.018
9	Kabupaten Sikka	33.643.977	527.528.347	44.755.367	609.684.083	47.340.132	716.926.798
10	Kabupaten Ende	20.358.265	531.705.266	32.784.891	614.515.172	38.595.650	696.389.460
11	Kabupaten Nagekeo	15.961.509	386.377.545	16.760.739	432.166.301	21.413.158	478.941.504
12	Kabupaten Ngada	18.355.267	442.813.778	27.892.441	449.523.653	29.695.961	489.855.356
13	Kabupaten Manggarai Timur	12.868.266	481.584.480	15.266.658	551.582.586	21.094.035	547.995.798
14	Kabupaten Manggarai	29.909.848	493.336.541	38.173.727	554.651.741	43.717.368	658.932.489
15	Kabupaten Manggarai Barat	21.965.879	448.070.616	25.751.468	463.946.000	28.787.544	529.882.627
16	Kabupaten Sumba Timur	31.513.104	563.305.571	40.193.741	574.405.671	35.433.587	730.703.785
17	Kabupaten Sumba Tengah	14.054.351	368.118.625	13.179.782	345.263.230	17.477.747	370.127.794
18	Kabupaten Sumba Barat	20.843.737	408.398.702	20.821.564	380.686.008	28.750.227	449.389.595
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	14.252.916	458.963.753	17.722.257	428.469.652	21.660.105	345.266.230
20	Kabupaten Rote Ndao	16.446.623	371.289.169	16.066.719	374.041.995	19.992.688	487.935.545
21	Kabupaten Sabu Raijua	5.450.813	200.635.401	6.477.397	371.808.777	9.148.510	375.509.429

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT (Data diolah).

Tabel di atas, memperlihatkan bahwa hampir di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi NTT, PAD (Pendapatan Asli Daerah) setiap tahunnya mengalami peningkatan begitu juga dengan Belanja Daerah yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Walaupun hampir di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi NTT PAD (Pendapatan Asli Daerah) setiap tahunnya terus mengalami peningkatan tetapi dalam hal pembiayaan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTT masih belum sepenuhnya mampu sehingga sampai saat ini semua Kabupaten/Kota Provinsi NTT masih menggantungkan kegiatan pemerintahannya dari Bantuan Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, semua Kabupaten/Kota Provinsi NTT belum memiliki tingkat kemandirian dalam mencukupi pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **"Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTT ?"

2. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTT ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT secara simultan;
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengadakan penelitian lanjutan.